

**KONSTRUKSI HUKUM EKSEKUSI ATAS PUTUSAN ARBITRASE  
YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO. 203/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)**

**ANISA NURUL QOUMY**

**Abstrak**

Dalam Penelitian ini, Penulis mengkaji bagaimana konstruksi hukum eksekusi atas suatu Putusan yang telah diputus oleh lembaga Arbitrase secara norma dan praktik. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* namun prakteknya Putusan Arbitrase dapat diajukan pembatalan dan perlawanan sita eksekusi yang berujung pada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seperti yang terjadi pada perkara No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Dengan terbukanya upaya-upaya lain tersebut, maka Putusan Arbitrase menjadi tidak benar-benar *final and binding*. Sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan keadilan hukum. Sementara para pelaku usaha memerlukan suatu kepastian hukum dan keadilan hukum dalam eksekusi Putusan Arbitrase. Metode penelitian dalam Penelitian ini menggunakan Normatif Yuridis. Hasil kajian rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa Putusan Perkara No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst salah satu contoh bahwa konstruksi hukum eksekusi atas Putusan Arbitrase di Indonesia belum memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak karena Penulis menemukan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam Putusan tersebut. Hasil kajian rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa hukum eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia belum memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak karena belum diaturnya hukum eksekusi Putusan Arbitrase secara detail dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga esensi Putusan Arbitrase belum sejalan dengan hukum eksekusi dan pelaksanaan eksekusi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Konstruksi Hukum, Hukum Eksekusi, Putusan Arbitrase

**LEGAL CONSTRUCTION OF EXECUTION OF ARBITRATION  
AWARDS THAT PROVIDE CERTAINTY AND JUSTICE (CASE STUDY  
OF DECISION NO. 203/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)**

**ANISA NURUL QOUMY**

**Abstract**

*In this research, the author examines how the legal construction of the execution of an award that has been decided by an arbitral institution in norms and practices. In Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the Arbitration Award is final and binding but in practice the Arbitration Award can be submitted for annulment and resistance to confiscation of execution which ends in appeals, cassation and judicial review as happened in case No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. With the opening of these other efforts, the Arbitration Award will not truly be final and binding. So that this results in legal uncertainty and legal justice. Meanwhile, business actors need legal certainty and legal justice in the execution of the Arbitration Award. The research method in this study uses normative juridical. The results of the study of the first problem formulation show that the Decision on Case No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst is one example that the legal construction of the execution of Arbitration Awards in Indonesia has not provided a sense of legal certainty and legal justice for the parties because the Author finds legal uncertainty and injustice in the Decision. The results of the study of the second problem formulation show that the law on the execution of Arbitral Awards in Indonesia has not provided a sense of legal certainty and legal justice for the parties because the law on the execution of Arbitral Awards has not been regulated in detail in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. So that the essence of the Arbitration Award is not in line with the law of execution and execution in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal Construction, Execution Law, Arbitration Award*